

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No.32/2003 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang juga telah direvisi dengan UU No.33/2003, bangsa Indonesia telah memulai proses perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan yang akan mempengaruhi segala dimensi kehidupan bangsa, baik dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Penerapan Undang-Undang tersebut ternyata dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah di daerah. Hal ini disebabkan karena setiap daerah dituntut harus mampu mandiri dan berbenah diri untuk menghadapi dan melaksanakan otonomi daerah, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, maupun kesiapan kemampuan keuangan daerah. Undang-undang itu sendiri merupakan perwujudan dari kehendak aspirasi rakyat. Dengan demikian menunjukkan kesiapan rakyat untuk mengatur dan membangun masing-masing daerahnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensinya pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain Pemerintah Daerah dituntut (1) mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan politik dan pembangunan, (2) birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Dalam upaya pembangunan daerah akan dimanfaatkan aspek-aspek yang secara ekonomi berpotensi untuk dikembangkan. Secara harafiah, potensi ekonomi dalam kerangka pembangunan daerah dapat diartikan sebagai kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan di bidang ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk membangun daerah tersebut. Potensi ekonomi dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis daerah yang dekat dengan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya.

Dalam proses pembangunan yang berorientasi otonomi daerah, berarti penyerahan proses pembangunan secara utuh kepada Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, dalam pembangunan ekonomi diperlukan intervensi pemerintah. Terdapat tiga fungsi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu (1) menyediakan *public goods*, (2) fungsi pengaturan atau *regulatory* dan (3) melaksanakan *auditing*. Dalam perekonomian modern peranan pemerintah secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan: (a) Peranan alokasi, yaitu

peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, (b) Peranan distribusi dan (c) Peranan stabilisasi (Mangkoesebroto,1999:2).

Salah satu fungsi pemerintah daerah adalah mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah-masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal /daerah (Arsyad, 1999:108). Sebagai indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah dan semakin kecilnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan harus dapat menggali seluruh potensi yang ada pada masing-masing daerah untuk diolah sehingga bermanfaat secara riil. Potensi-potensi yang ada masing-masing daerah yang antara lain terdiri potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi kultural dan potensi-potensi lainnya harus diupayakan dan diberdayakan secara optimal.

Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan suatu proses peningkatan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang. Tujuan dari pembangunan ekonomi nasional maupun regional/daerah adalah (1) menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, (2) mencapai stabilitas perekonomian nasional/daerah, dan (3) membangun basis ekonomi dan kesempatan yang beraneka ragam (Todaro, 1999: 35)

Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam usaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan rumah tangganya. Pada umumnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dominan bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Akibatnya tampak disparitas yang sangat besar antara pangsa pajak daerah dan retribusi daerah dengan pangsa komponen-komponen PAD lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum melakukan penggalan potensi sumber-sumber PAD secara optimal. Penerimaan Asli Daerah dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah yang bersangkutan.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Relevansi uraian tersebut terhadap pembangunan daerah di Propinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Surakarta adalah bahwa Kota Surakarta seyogyanya melakukan kajian identifikasi potensi ekonominya. Dalam studi penelitian ini akan memfokuskan analisis pembangunan, khususnya Kota Surakarta. Permasalahan yang menarik untuk dianalisis adalah tahun 1999 awal berlakunya UU No. 22 dan telah direvisi tahun 2003 pertumbuhan perekonomian kota Surakarta pada tahun 1999 PDRB mengalami pertumbuhan yang sangat kecil, sedangkan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Namun pada tahun berikutnya PDRB kota surakarta mengalami peningkatan dan peningkatannya lebih tinggi dibanding PDRB Jawa Tengah.

Kota Surakarta merupakan salah satu Kota yang terletak di wilayah Jawa Tengah. Berarti PDRB Kota Surakarta juga salah satu unsur dari PDRB Jawa Tengah. Secara rinci pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993, Propinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta pada tahun 1999-2003 disajikan dalam Tabel 1.1. Tabel tersebut menunjukkan pertumbuhan riil perekonomian Propinsi Jawa Tengah, maupun Kota Surakarta dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan. Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1999 pertumbuhan perekonomiannya 3,49 dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 4,07, sedangkan Kota Surakarta pada tahun 1999 pertumbuhan perekonomiannya sangat kecil 1,44 dibanding Jawa Tengah. Pada tahun 2003 tumbuh menjadi 6,48 yang besarnya melebihi Jawa Tengah.

Tabel 1.1
 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
 Jawa Tengah dan Surakarta Tahun 1999-2003

Tahun	Jawa Tengah		Surakarta	
	PDRB (000.000,00) (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%) (Persen)	PDRB (000.000,00) (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%) (Persen)
1999	39.394.513,74	3,49	1.250.807,41	1,44
2000	40.941.667,09	3,93	1.340.630,13	4,10
2001	42.305.176,40	3,33	1.395.342,53	4,08
2002	43.775.693,08	3,48	1.469.478,06	5,31
2003	45.557.108,45	4,07	1.564.707,69	6,48

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang akan mencakup semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan hankam. Masing-masing aspek berpengaruh terhadap pola pembangunan daerah berupa interaksi antara aspek dan wilayah, dimana masa yang akan datang dihadapkan dengan banyak tantangan yang semakin kompleks.

Salah satu upaya menghadapi segala kemungkinan di masa yang akan datang tersebut, Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pembahasan identifikasi potensi ekonomi daerah menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan penentuan potensi ekonomi daerah Kota Surakarta yaitu bagaimana kinerja ekonomi kota Surakarta dibandingkan dengan potensi ekonomi Propinsi Jawa Tengah dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat APBD Surakarta yang terbatas. Pada sisi yang lain kota Surakarta ingin dipacu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapitanya lebih tinggi lagi, maka diperlukan kajian untuk mengetahui sektor apa saja yang relatif lebih potensial untuk dikembangkan di kota Surakarta.

Hasil analisis tersebut diharapkan dapat sebagai informasi berupa temuan-temuan sumber potensi ekonomi daerah Kota Surakarta yang bersifat unggulan serta berprospektif untuk dapat dikembangkan dalam rangka menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat, khususnya daerah kota Surakarta.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah :

- a. Bagaimana kinerja ekonomi kota Surakarta dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat APBD Surakarta yang terbatas?
- b. Sektor apa saja yang relatif lebih potensial untuk dikembangkan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi ekonomi yang ada di Kota Surakarta. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menentukan tipe atau klasifikasi kinerja ekonomi kota Surakarta dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah.
- b. Menentukan sektor-sektor yang potensial dalam perekonomian kota Surakarta untuk dikembangkan di waktu yang akan datang.

1.4. Manfaat penelitian

Faedah /manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta, terutama para pengambil keputusan maupun pelaksana pembangunan daerah untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahap berikutnya.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan bacaan dan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan potensi ekonomi yang ada di Kota Surakarta.

1.5. Studi Terkait

Penelitian tentang identifikasi sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menggunakan pendekatan alat analisis yang berbeda-beda.

Soepono (1993:43-55) melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1980-1990, dengan menggunakan alat analisis Shife-share klasik, modifikasi Estaban-Marquillas dan modifikasi Arcelus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DIY secara keseluruhan tidak memiliki keunggulan kompetitif namun dengan pendekatan Arcelus dapat dilihat pengaruh positif dari bauran industri regional, kecuali sektor pertanian. Pertumbuhan nasional dan bauran industri mempengaruhi pertumbuhan kesempatan kerja di DIY.

Kuncoro (1996:33-41) melakukan penelitian di wilayah Indonesia periode 1983-1990, dengan menggunakan alat analisis Klassen tipologi dan rasio gini. Hasil penelitian bahwa (1) rata-rata kinerja pertumbuhan ekonomi 27 propinsi di Indonesia berada pada posisi di bawah rata-rata nasional, (2) pembangunan

ekonomi regional dan kesenjangan antar daerah di Indonesia tidak merata bahkan terkesan perbedaan yang ekstrim atau menyolok.

Sjafrizal (1997: 27-38) melakukan penelitian di Wilayah Indonesia Bagian Barat periode 1987-1995, dengan menggunakan alat analisis Tipologi- Klassen dan Indeks Williamson. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Barat merupakan daerah maju dan tumbuh cepat.

Suardirgantara (2005) melakukan penelitian analisis *shift-share* pertumbuhan sektoral perekonomian di Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 1993-2003. Penelitian ini menggunakan obyek Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menentukan sektor-sektor unggulan dengan menggunakan pendekatan analisis *location quotient* (LQ) dan analisis *shift-share*. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu dari tahun 1993 hingga 2003, telah terjadi pergeseran peran sektoral di Propinsi D.I. Yogyakarta. Sektor pertanian yang pada awal periode pengamatan cukup mendominasi aktivitas perekonomian cenderung berkurang perannya terutama setelah krisis ekonomi tahun 1997. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang menjadi sektor ekonomi yang diunggulkan karena memiliki keuntungan lokasional yang paling tinggi. Peran sektor ini terhadap perekonomian nasional juga tergolong paling tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya di Propinsi D.I. Yogyakarta.

Perbedaan penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah (a) unit analisisnya yaitu Kota Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah, (b) penyesuaian alat analisis dengan konteks penelitian. Sedangkan

kesamaannya adalah permasalahan dan penggunaan alat analisis, yaitu menggunakan alat analisis yang pernah digunakan, tetapi dalam studi penelitian ini menggabungkan dan menyesuaikan dengan permasalahannya.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian tentang identifikasi potensi ekonomi Kota Surakarta ini, dilakukan dengan menganalisis data tentang kinerja perekonomian Propinsi Jawa Tengah dan kota Surakarta khususnya, selama periode 1999-2004.

Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah, BPS Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah dan PDRB Kota Surakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dan bukan atas dasar harga berlaku (untuk membedakannya lihat misalnya Widodo, 2006:23). Data yang diambil tersebut, disesuaikan dengan variabel pengamatan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

- a. PDRB Propinsi Jawa Tengah tahun 1999-2004 atas dasar harga konstan, menurut sektor dan subsektornya, tanpa migas.
- b. PDRB Kota Surakarta tahun 1999-2004 atas dasar harga konstan, menurut sektor dan subsektornya, tanpa migas.

Digunakannya PDRB yang terdiri dari sembilan sektor dan masing-masing subsektornya serta tanpa mengikutkan subsektor migas, karena surakarta tidak memiliki sumber alam migas, sehingga hal tersebut dapat lebih menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Data yang diperoleh sebagai variabel penelitian selanjutnya dianalisis sebagai berikut :

- a. Menentukan model tipologi posisi klasifikasi perekonomian Kota Surakarta. Dalam analisis ini digunakan dua pendekatan dasar penghitungan. Pertama penentuan didasarkan pada total PDRB Kota Surakarta dibandingkan dengan perekonomian Propinsi Jawa Tengah atau total perekonomian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kedua, dengan dasar penghitungan masing-masing sektor dan subsektor kegiatan ekonomi Kota Surakarta dibandingkan dengan hal yang sama ditingkat Jawa Tengah. Pendekatan teori menggunakan tipologi Klassen. Variabel-variabel yang dibutuhkan adalah (1) pertumbuhan total PDRB antara tahun 1999-2004 dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian tahun dasar perhitungan PDRB, (2) PDRB Per Kapita pada tahun yang sama, (3) Pertumbuhan rata-rata masing-masing sektor dan subsektor dan (4) rata-rata kontribusi sektor dan subsektor terhadap total PDRB selama periode penelitian. Data variabel tersebut kemudian diaplikasikan kedalam matrik tipologi.
- b. Mengetahui pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian serta mengetahui potensi unggulannya dengan pendekatan *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift-Share*. Variabel yang dibutuhkan adalah (1) pertumbuhan dari masing-masing subsektor maupun sektor, selama periode tahun 1999-2004, (2) distribusi masing-masing subsektor maupun sektor untuk tiap tahunnya selama periode tahun 1999-2004.

Metode untuk mengukur indikator perkembangan ekonomi Kota Surakarta yaitu mengidentifikasi sektor andalan, yang merupakan salah satu cara untuk menentukan hubungan antara sektor maupun subsektor kegiatan ekonomi di Kota Surakarta dan hal yang sama ditingkat Jawa Tengah. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ adalah nilai tambah sektor dan subsektor ekonomi dalam PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 1993. Cara yang ditempuh untuk mendapatkan data adalah mengamati dan menginventarisasi nilai tambah dari masing-masing sektor maupun subsektor perekonomian tiap tahunnya selama lima tahun periode pengamatan. Data tersebut yang kemudian dijadikan dasar identifikasi sektor andalan atau basis. Setelah diketahui sektor andalan, untuk mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi sektor andalan tersebut digunakan pendekatan alat analisis *shift-share*.

1.7. Alat Analisis

Analisis identifikasi potensi ekonomi daerah Kota Surakarta ini dilakukan dengan pendekatan pengolahan data sekunder. Data sekunder yang diamati periode tahun 1999 – 2004. Rentang waktu tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Klassen tipologi

Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi laju pertumbuhan ekonomi daerah Kota Surakarta. Formulasi alat analisis ini sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB perkapita (y)	
	$y_1 > y$	$y_1 < y$
$r_1 > r$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
$r_1 < r$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber : Hill dalam Kuncoro (1996)

Keterangan : r_1 = Laju pertumbuhan PDRB Kota Surakarta
 r = Laju pertumbuhan total PDRB Kab/Kota di Jateng
 y_1 = Pendapatan perkapita Kota Surakarta
 y = Pendapatan total perkapita Kab/Kota di Jateng

2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Dengan alat analisis *Location Quotient* (LQ) ini dapat diketahui sektor maupun subsektor ekonomi unggulan daerah Kota Surakarta dari sisi kontribusi terhadap PDRB dibandingkan dengan kontribusi sektor dan subsektor ekonomi yang sama Propinsi Jawa Tengah. Formulasi dari alat analisis ini adalah:

$$LQ_{(x)} \text{ Kab./Kota} = \frac{\text{PDRB Surakarta sektor x} / \text{PDRB Surakarta}}{\text{PDRB Jateng sektor x} / \text{PDRB Jateng}}$$

Dari hasil perhitungan LQ ini dapat diketahui bahwa apabila :

- LQ suatu sektor > 1 dikatakan sektor unggulan
- LQ suatu sektor < 1 dikatakan sektor bukan unggulan
- LQ suatu sektor $= 1$ dikatakan setingkat sektor tingkat propinsi

Semakin tinggi nilai LQ suatu sektor berarti semakin tinggi pula *competitive advantage* daerah yang bersangkutan dalam mengembangkan sektor tersebut. Metode LQ merupakan salah satu indikator sederhana yang menunjukkan “kekuatan” akan besar dan kecilnya sektor pada suatu daerah dibandingkan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas wilayahnya (Propinsi). Arsyad (1999:143) menyatakan kelemahan tehnik LQ adalah (a) Selera atau pola konsumsi dan masyarakat setempat terdapat perbedaan baik antar daerah maupun dalam daerah yang sama, (b) kebutuhan konsumsi rata-rata untuk satu jenis barang setiap daerah berbeda, dan (c) bahan keperluan industri berbeda antar daerah.

3. Analisis *Shift-share*

Dengan menggunakan alat analisis *shift-share* akan diketahui perubahan struktur ekonomi daerah Kota Surakarta dan membandingkannya dengan regional Jawa Tengah. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui seberapa besar kinerja perekonomian Kota Surakarta didasarkan pada keunggulan kompetitif sektoral dalam suatu regional. Dalam penelitian ini menggunakan modifikasi notasi yang dipakai Soepono (1993:45). Formulasi model klasik yang digunakan :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots(1)$$

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij} \dots\dots\dots(2)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n \dots\dots\dots(3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n) \dots\dots\dots(4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots(5)$$

Dimana r_{ij} , r_{in} dan r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah dan laju pertumbuhan regional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = (Y^*_{ij} - Y_{ij}) / Y_{ij} \dots\dots\dots (6)$$

$$r_{in} = (Y^*_{in} - Y_{in}) / Y_{in} \dots\dots\dots (7)$$

$$r_n = (Y^*_n - Y_n) / Y_n \dots\dots\dots (8)$$

Selanjutnya dari modifikasi Estaban-Marquillas (E-M) yang memperhitungkan pengaruh alokasi formulasinya sebagai berikut :

$$Y'_{ij} = Y_j (Y_{in} - Y_n) \dots\dots\dots (9)$$

$$C'_{ij} = Y'_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (10)$$

$$A_{ij} = (Y_{ij} - Y'_{ij})(r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (11)$$

$$D_{ij} = Y_{ij} (r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_n) + Y'_{ij} (r_{ij} - r_{in}) + (Y_{ij} - Y'_{ij})(r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

D_{ij} = Perubahan PDRB sektor I di Kota Surakarta

N_{ij} = Pengaruh Pertumbuhan PDRB sektor I di Jawa Tengah

M_{ij} = Pengaruh Pertumbuhan PDRB sektor I di Kota Surakarta yang dipengaruhi Bauran Industri regional

C_{ij} = Keunggulan Kompetitif sektor I yang dipengaruhi laju pertumbuhan Kota Surakarta

Y_{ij} = PDRB sektor I Kota Surakarta pada tahun awal analisis

Y^*_{ij} = PDRB sektor I Kota Surakarta pada tahun akhir analisis

Y_n = Total PDRB Jateng pada tahun (t)

r_{in} = Laju pertumbuhan Sektor I PDRB Jawa Tengah

r_n = Laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah

r_{ij} = Laju pertumbuhan Sektor I PDRB Kota Surakarta

r_j = Laju pertumbuhan PDRB Kota Surakarta

Y'_{ij} = PDRB Kota Surakarta apabila laju pertumbuhan disamakan dengan laju pertumbuhan Jawa Tengah

C'_{ij} = Keunggulan Kompetitif sektor I yang dipengaruhi laju pertumbuhan Jateng

A_{ij} = Tingkat spesialisasi Kota Surakarta masing-masing sektor

1.7. Sistematika penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pokok bahasan tentang identifikasi potensi ekonomi Kota Surakarta, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, studi terkait, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan pustaka landasan teori dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian

Bab III Gambaran Umum

Berisi uraian tentang gambaran umum tentang objek penelitian dan variabel penelitian.

Bab IV Analisa Data

Berisi analisis data beserta pembahasannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

berisi kesimpulan hasil analisis dan implikasi kebijakan yang mungkin dapat diterapkan di Kota Surakarta.